

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, CV. Kita, Surabaya.
- Apeldoorn, L.J. Van 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fatkhurohman et. al., 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Kontitusi Di Indonesia*, cet. ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartasaputra, R.G., et.al., 1986, *“Manajemen Perupahan pada Perusahaan”*, Media Aksara, Jakarta.
- Mamuji, Sri et.al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mazuki, Peter Mahmud 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, Ahmad 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli, Hardijan, 2011, *Problematika Upah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Siahaan, Maruar, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, cet.1, Konstitusi Press, Jakarta.

Simanjuntak, Payaman J. 1985, "*Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sinamo, Nomoensen 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama sejahtera, Jakarta.

Soepomo, Iman 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi*, cet. ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tim Penyusun Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. JURNAL

Ali MD, Ahmad, 2012, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi 1, Jogjakarta.

C. HASIL PENELITIAN

Anggi, 2010, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Peran Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (Fpbj)", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Winda Agustina, 2011, "Perlindungan upah bagi calon Notaris yang bekerja magang di kantor Notaris", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep - 150 / Men / 2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-78 /Men/2001 tentang perubahan atas beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015.

E. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 September 2011.

Putusan Mahkamah Agung No. 167 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 Mei 2009.

Putusan Mahkamah Agung No.010.PK/PDT.SUS/2009 tanggal 30 September 2009.

Putusan P4D Propinsi Sumatera Utara No. 324/557/234-06/PHK/II/09-2005 tanggal 20 September 2005.

Putusan Mahkamah Agung No. 502 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 15 Juni 2010.

Putusan Mahkamah Agung No.619/Pdt.Sus/2008 tanggal 20 Oktober 2008.

Putusan Mahkamah Agung No. 858 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Januari 2010.

Putusan Mahkamah Agung No. 450 K/Pdt .Sus/2011 tanggal 1 Agustus 2011.

Putusan Mahkamah Agung No. 167 K/Pdt .Sus/2009 tanggal 14 Mei 2009.

Putusan Mahkamah Agung No.045 K/PDT.SUS/2010 tanggal 24 Mei 2010.

Putusan Mahkamah Agung No.552 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 20 November 2014.

Putusan MA Nomor 869 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 30 Januari 2017.

Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Utara dengan Nomor 8659/-1.831, tanggal 29 September 2014.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 281/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 26 April 2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/PDT.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012.

Putusan Mahkamah Agung No. 07 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 Maret 2012.

Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/PDT.SUS/2012 tanggal 18 September 2012.

F. INTERNET

Aunurrohim, Mohamad, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2018.

Gumilar, Romy, “Penyelesaian Perkara Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan” Dikutip dari <http://www.romygumilar.wordpress.com> diakses 13 Desember 2018.

Hasibuan, Badai Husain dan Rahmi Purnama Melati, “Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia” dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2018.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2018.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2018.

<http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2018.

Kalo, Syafruddin, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasakeadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2018.

Sumadi, Ahmad Fadlil, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2018.

Wantu, Fence M., “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo), Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 Desember 2018, hlm. 484. *Putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.*

G. WAWANCARA

Wawancara dengan Aris Rustanta, *Director of HRD* Grand Hyatt Jakarta pada tanggal 3 Desember 2018.

Wawancara dengan Oddie Hutama, Ketua Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia, pada tanggal 10 Desember 2018.